

# Bank Kalbar Bantah Korupsi

PONTIANAK. Pelanggaran yang ditemukan BPK RI di salah satu BPD Kalbar masih dianggap wajar. Pelanggaran itu sendiri tidak menimbulkan kerugian negara karena hanya seputar pelanggaran administrasi saja.

"Tidak ada indikasi korupsi, semuanya temuan BPK bersifat administratif saja. Kalau administratif ini kita selesaikan, misalkan kalau saran mereka untuk memperbaiki SOP kita perbaiki dan kita laporkan kepada mereka dan dianggap semua itu sudah selesai," jelas Direktur Utama

■ Halaman 7



Dirut Bank Kalbar memberikan klarifikasi terkait temuan BPK RI terhadap pemberian kredit kepada salah satu pemda di Kalbar yang terindikasi korupsi. JULIANUS RATNO

## Bank Kalbar

Bank Kalbar, Sudirman HMY kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Komisi B DPRD Kalbar di lantai V gedung Bank Kalbar, Jumat (16/12).

BPK RI menemukan kredit tidak sesuai ketentuan di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Salah satunya di BPD wilayah Kalbar. Temuan tersebut sebatas pelanggaran administratif. Pemberian kredit kepada salah satu Pemda sebesar Rp 2,5 miliar di Kalbar tidak disertai dokumen persetujuan dewan.

Sudirman menjelaskan, audit yang dilakukan BPK RI itu hanya di 13 BPD dan kebetulan BPD di Kalbar juga salah satunya. Audit itu dilakukan hingga tahun berjalan, yakni sampai posisi September 2011. "Audit itu selama 45 hari hingga September 2011. BPK melihat pada posisi 2009 dan 2010, bukan hanya tahun ini, malahan sampai kondisi September 2011," jelas Sudirman.

Dalam pemberian kredit per Desember 2010-31 Desember

2011, tidak adanya persetujuan dewan. Namun pada 31 Desember 2011 sudah lunas sesuai jangka waktu. Menurut Sudirman, disebutkan Rp2,770 miliar itu tidak benar, tapi yang sebenarnya adalah Rp2,5 miliar. Kredit tersebut diberikan kepada pemda dengan tujuan yang jelas, seperti untuk pembangunan jalan serta kegiatan lainnya.

"Nama rekeningnya pinjaman Pemda. Salah satu Pemda di Kalbar. Karena itu nasabah, tidak boleh kita beritahukan, tapi yang jelas bukan pemerintah provinsi," terang Sudirman.

Dia menambahkan, temuan itu terjadi karena perbedaan persepsi terhadap aturan. "Makanya BPK menyarankan kepada kita agar SOP-nya dipertegas. Masukan syarat seperti yang disarankan mereka. Kalau jangka menengah dan panjang harus persetujuan dewan. Kita melihatnya itu jangka pendek, karena dalam ketentuan jangka pendek tidak perlu persetujuan dewan," ujar Sudirman.

.....dari halaman 1

Namun ternyata, walaupun jangka pendek harus persetujuan dewan. "Jadi tinggal menambah dalam SOP ketentuan itu tadi. Itu kita perbaiki nanti. Insya Allah Desember 2011 sudah lunas. Yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan di kita, tapi kita kan ikutan disitu, ada beberapa Pemda seperti Papua dan Sulawesi, itu yang sebenarnya bermasalah. Mungkin saja," kilah Sudirman.

Dalam rapat kerja Komisi B DPRD Kalbar dengan Bank Kalbar, selain mempertanyakan temuan BPK RI itu. Juga dibahas berbagai persoalan dan terbosan untuk menjadikan Bank Kalbar lebih baik. Salah satu persoalan yang menonjol adalah pemberian kredit konsumtif lebih besar ketimbang kredit produktif.

Pertemuan itu, hadir pula jajaran Direksi Bank Kalbar. Dari Komisi B langsung dipimpin Koordinator Komisi Nicodemus R Toun, Wakil Ketua Komisi Sy Izhar Asyuri dan sejumlah anggota Komisi. (jul)